

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Akuntansi Sektor Publik di definisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga – lembaga tinggi negara dan departemen – departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek – proyek kerja sama sektor publik dan swasta (Bastian, 2010). Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang relatif luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta/bisnis. Peranan akuntansi sektor publik di tunjukan untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga di lakukan swasta. Akan tetapi, untuk peranan dan tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta.

Nugroho (2016) menyatakan bahwa perkembangan akuntansi sektor publik di indonesia semakin pesat terutama dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah. Sejalan dengan otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah.

Standar akuntansi keuangan sektor publik merupakan sebuah pedoman yang menjadi dasar berjalannya fungsi-fungsi tahapan siklus akuntansi sektor publik,

yaitu perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan, audit, dan pertanggung jawaban publik. Berdasarkan (Peraturan Pemerintah RI No 24 Tahun 2005, 2009) tentang standar akuntansi keuangan pemerintah, Standar akuntansi diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah dapat dibandingkan, dan adanya kesamaan persepsi dan pemahaman antar penyaji laporan keuangan, penggunaan laporan keuangan maupun pengawasan laporan keuangan penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan informasi keuangan secara umum yang lebih berkualitas bagi para pengguna laporan keuangan dalam rangka menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Bagi para pengawasan keuangan negara, laporan keuangan yang berbasis standar akuntansi memberikan tantangan baru dalam peningkatan aspek pengawasan terhadap kualitas laporan pemerintah. Tantangan tersebut adalah kemampuan pihak pengawas dalam mengungkap kewajaran penyajian laporan keuangan melalui opini yang diberikan. Kemampuan ini tentunya diharapkan memperbaiki pengelolaan keuangan negara (Santoso, 1965)

Salah satu kelemahan akuntansi pemerintah adalah akuntansi pemerintah menyusun laporan keuangan pertanggungjawaban untuk kepentingan pemerintah (bersifat internal) bukan kepada publik padahal yang dikelola pemerintah adalah dana atau uang publik. Kebijakan reformasi keuangan daerah dalam rangka mewujudkan *good governance* pada instansi pemerintah mulai dilaksanakan seiring dengan berlakunya aturan mengenai implementasi standar akuntansi pemerintah

dalam peraturan pemerintah (2010). Prinsip yang harus di gunakan adalah tata kelola keuangan yaitu penyajian laporan keuangan yang baik agar terwujudnya *good governance* pada instansi pemerinta perlu dilakukan peningkatan terhadap kualitas akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

Suwanda (2013:4) sistem pengendalian internal pemerintah yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pengendalian pusat dan daerah. SPIP merupakan suatu proses yang berjalan terus untuk semakin menyempurnakan pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan harus fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan, pelaporan keuangan harus semakin andal yang ditunjang dengan SDM yang semakin profesional dan peralatan yang semakin memadai, dan aset semakin aman baik secara admistrasi maupun secara fisik. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif efisien keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan yang dilakukan secara terus menerus oleh pemimpin dan pegawai (Mattoasi et al., 2021)

Otonomi daerah di indonesia yang di dasarkan pada Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing – masing. Dengan

berlakunya Undang – Undang tersebut di atas membawa konsekuensi bagi daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Pengendalian internal pada pemerintah pusat dan daerah berpedoman pada PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang pengendalian sistem internal. Sistem pengendalian internal sangat penting dalam menunjang perbaikan pengelolaan pemerintah daerah dan merupakan faktor pendukung untuk menciptakan pemerintah yang akuntabel dan transparan sebagai cerminan dari kinerja yang baik (Mamuaja, 2016).

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan satu dinas yang berfungsi membantu urusan pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering ulu khususnya mengenai pelayanan berkenaan tentang pajak daerah, restoran, hotel, hiburan, mineral logam dan bebatuan, reklame, sarang burung walet, air tanah, pajak penerangan jalan (PPJ), PBB dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Badan pendapatan daerah (BAPENDA) sudah berupaya untuk meningkatkan penerapan akuntansi sektor publik dalam sistem keuangan daerah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan). Untuk melihat kondisi sebenarnya mengenai akuntansi sektor publik pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten OKU telah dilakukan pra-survey dengan menyebar kuesioner yang terdiri dari beberapa indikator mengenai penerapan akuntansi sektor publik kepada 34 pegawai. Berdasarkan penyebaran kuesioner tersebut diperoleh data tabel 1.1 sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Kuesioner Mengenai Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik**  
**pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU**

| No.  | Pernyataan  | Jawaban |      |      |    |     | Rata-rata |
|--|---|---------|------|------|----|-----|-----------|
|  |   | SS      | S    | RR   | TS | STS |           |
| <b>Analisis bukti transaksi</b>  |   |         |      |      |    |     |           |
| 1.   | Transaksi telah didukung dengan bukti-bukti yang sesuai ketentuan               | 82,4    | 11,8 | 5,9  |    |     | 3,76      |
| 2.   | Pencatatan transaksi melibatkan bagian internal dan eksternal                   | 11,8    | 88,2 | 0,0  |    |     | 3,12      |
| <b>Pencatatan Data Transaksi</b>   |   |         |      |      |    |     |           |
| 3.   | Pencatatan transaksi telah di dukung dengan bukti–bukti sesuai dengan ketentuan | 8,8     | 82,4 | 8,8  |    |     | 3,00      |
| 4.   | Perencanaan utang telah didukung dengan bukti–bukti sesuai dengan ketentuan     | 8,8     | 82,4 | 8,8  |    |     | 3,00      |
| <b>Pengikhtisaran</b>  |   |         |      |      |    |     |           |
| 5.   | Pengelolaan keuangan telah ada pemisahan tugas fungsi dan tanggung jawab        | 8,8     | 79,4 | 5,9  |    |     | 2,79      |
| 6.   | Pengelola keuangan telah memahami penatausahaan keuangan sesuai ketentuan       | 14,7    | 79,4 | 5,9  |    |     | 3,09      |
| <b>Pelaporan</b>   |   |         |      |      |    |     |           |
| 7.   | Anggaran penerimaan dapat memenuhi seluruh kebutuhan anggaran pengeluaran       | 8,8     | 44,1 | 47,1 |    |     | 2,62      |
| 8.   | Laporan realisasi anggaran telah di dukung dengan bukti–bukti sesuai ketentuan  | 23,5    | 20,6 | 55,9 |    |     | 2,68      |
| <b>Transaksi Persetujuan Jual Beli Antara Satu Pihak Dengan Pihak Lain</b> |   |         |      |      |    |     |           |

|     |   |      |      |      |  |  |      |
|-----|---|------|------|------|--|--|------|
| 9.  | Pencatatan transaksi telah didukung dengan bukti-bukti sesuai ketentuan                 | 5,9  | 82,4 | 11,8 |  |  | 2,94 |
| 10. | Informasi transaksi disajikan dengan jujur dan dengan terbuka (tidak ada yang ditutupi) | 11,8 | 70,6 | 17,6 |  |  | 2,94 |

*Sumber: hasil olah data kuosioner sementara (2022)*

Berdasarkan tabel 1.1 dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat permasalahan mengenai pelaporan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten OKU. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil rata-rata yang paling terkecil terdapat di indikator pelaporan yaitu sebesar 2,62 yang menyebutkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik dalam pelaporan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU belum terlaksanan secara maksimal seperti halnya laporan keuangan pendapatan pajak daerah tidak di publikasi sehingga tidak transparasi dan masih rendahnya penerapan akuntansi sektor publik karena masih ada pegawai yang bekerja tidak sesuai pada bidangnya seperti dibagian keuangannya, pegawai yang berkerja pada bidang tersebut belum memiliki kompetensi di bidang akuntansi.

Selain itu pengendalian internal juga sangat penting dalam kinerja instansi pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah (bapenda). Tabel 1.2 akan menggambarkan lebih jelas mengenai pengendalian internal pada Badan Pendapatan Daerah.

**Tabel 1.2**  
**Hasil Kuesioner Mengenai Pengendalian Internal pada Badan**  
**Pendapatan Daerah Kabupaten OKU**

| No.                             | Pernyataan  | Jawaban |      |      |    |     | Rata-rata |
|---------------------------------|---|---------|------|------|----|-----|-----------|
|                                 |   | SS      | S    | RR   | TS | STS |           |
| <b>Lingkungan pengendalian</b>  |   |         |      |      |    |     |           |
| 1.                              | BAPENDA telah memiliki standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi.   | 14,7    | 79,4 | 5,9  |    |     | 3,09      |
| 2.                              | Pemimpin BAPENDA selalu mengambil tindakan yang tegas atas pelanggaran kebijakan, prosedur, atau aturan perilaku.   | 11,8    | 29,4 | 58,8 |    |     | 2,53      |
| <b>Penilaian Risiko</b>         |   |         |      |      |    |     |           |
| 3.                              | Pimpinan telah melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. | 8,8     | 85,3 | 5,9  |    |     | 3,03      |
| 4.                              | Pimpinan selalu memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi risiko pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi.   | 14,7    | 76,5 | 8,8  |    |     | 3,06      |
| <b>Aktivitas Pengendalian</b>   |   |         |      |      |    |     |           |
| 5.                              | Semua transaksi yang dientri dan diproses kedalam komputer adalah seluruh transaksi yang telah diotorisasi.   | 11,8    | 76,5 | 11,8 |    |     | 3,00      |
| 6.                              | Pimpinan BAPENDA telah mengembangkan rencana untuk identifikasi dan pengamanan aset infrastruktur.  | 5,9     | 82,4 | 11,8 |    |     | 2,94      |
| <b>Informasi dan Komunikasi</b> |   |         |      |      |    |     |           |
| 7.                              | Informasi telah disediakan secara tepat waktu dan memungkinkan untuk dilakukan tindakan korektif secara tepat   | 14,7    | 17,6 | 67,6 |    |     | 2,47      |

|                   |  |      |      |      |  |  |      |
|-------------------|--|------|------|------|--|--|------|
| 8.                | Saluran komunikasi berkelanjutan telah dilaksanakan secara terbuka dan aparat pengawasa intern dalam memberikan masukan signifikan.    | 11,8 | 88,2 | 0,0  |  |  | 3,12 |
| <b>Pengawasan</b> |  |      |      |      |  |  |      |
| 9.                | Pengawasan di BAPENDA sudah berjalan dengan baik.  | 11,8 | 67,6 | 20,6 |  |  | 2,91 |
| 10.               | Sebagai tindak lanjut dari penilaian terhadap kualitas pengendalian internal, BAPENDA telah melakukan perbaikan pengendalian internal. | 11,8 | 82,4 | 5,9  |  |  | 3,06 |

*Sumber: hasil olah data kuesioner sementara (2022)*

Berdasarkan tabel 1.2 ditarik kesimpulan bahwa terdapat permasalahan mengenai informasi telah disajikan secara tepat waktu dan memungkinkan dilakukan tindak korektif secara tepat pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten OKU. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil rata-rata yang paling terkecil yang terdapat di indikator informasi dan komunikasi yaitu sebesar 2,47 yang menyebutkan bahwa informasi dan komunikasi pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten OKU belum terlaksana secara maksimal. Dalam hal penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) masih banyak kendala-kendala yang dihadapi instansi pemerintah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten OKU yaitu menyangkut sistem akuntansi dan pelaporan keuangan seperti, infrastruktur yang belum sempurna, kurangnya komitmen pimpinan, banyaknya jumlah satuan kerja yang masih belum memiliki kompetensi akuntansi pemerintah, serta belum tersedianya SDM dengan kualitas memadai di bidang keuangan dan akuntansi.



Alamanda (2013) menyebutkan bahwa kinerja pemerintah daerah merupakan prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam periode tertentu melalui pengendalian internal pada organisasi pemerintah guna membenahi dan mengurangi kasus tentang buruknya kinerja pemerintah daerah. Penelitian alamanda juga didukung oleh sukma dan anggarsari (2009). Penelitian ini menyatakan dalam kaitannya dengan lingkup kerja pemerintah daerah, kinerja pemerintah daerah berarti bagaimana atau sejauh mana pemerintah daerah menyelenggarakan urusan – urusan pemerintahannya, sehingga kinerja pemerintah daerah yang baik dapat dilihat juga dari penilaian pemerintah (Salamah,dkk 2021).

Dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah sehingga menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang baik. Pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah akan menjamin bahwa laporan keuangan tersebut disajikan secara benar dan wajar sesuai standar akuntansi keuangan pemerintah yaitu penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan perintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 (Pemerintah, 2003) tentang Keuangan Negara, yang menyatakan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dan APBD disusun serta disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Sehingga informasi yang terjadi terdapat dalam laporan keuangan tersebut pengguna dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengambilan keputusan.

Berdasarkan uraian diatas, dan perbedaan hasil penelitian-penelitian yang dilakukan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut dengan membuat skripsi yang berjudul : **Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan pengendalian internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Apakah ada pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu baik secara parsial maupun simultan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu secara parsial maupun simultan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berikut ini manfaat yang diperoleh dalam penelitian:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Menambah wawasan pengetahuan bagi mahasiswa Universitas Baturaja khususnya Program Sudi Akuntansi tentang Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor

Publik dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Memberikan saran dan masukan yang bermanfaat mengenai pengaruh penerapan akuntansi sektor publik, dan pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu sehingga dapat mengurangi kecurangan dan meningkatkan kinerja instansi di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu.

